

BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUTUHAN DANA UNTUK PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Abbas Ghozali

FEB Universitas Islam Negeri Jakarta (e-mail: abbas.ghozali@gmail.com)

Abstrak: Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Dana yang Dibutuhkan untuk Pendidikan Dasar Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis pada tahun 2009 dan membandingkannya dengan realisasi anggaran untuk pendidikan dasar. Metode yang digunakan meliputi proyeksi pendaftaran, identifikasi sumberdaya pendidikan yang diperlukan, ketersediaan dan keterbatasan, identifikasi biaya satuan masing-masing unsur dan perkiraan total dana yang diperlukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar pada tahun 2009 membutuhkan dana sebesar Rp157,22 trilyun, termasuk anggaran untuk SD dan SMP. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan anggaran hanya Rp132,24 trilyun sehingga ada kekurangan sebesar Rp25 trilyun.

Kata Kunci: *biaya satuan, pendidikandasar gratis*

Abstract: The Unit cost of Basic Education and the Funds Needed for Free Basic Education. This study was aimed to estimate the funds needed to implement free basic education in 2009 and compare it with the budget realization for basic education. The methods employed included projection of enrollment, required educational resource identification, the availability and shortage, identification of the unit cost of each component, and estimation of the total funds needed. The findings revealed that implementing free basic education in 2009 required as much as Rp157.22 trillion, including the budget for primary schools and junior secondary schools. The national and regional government levels provided the budget for basic education as much as Rp132.24 trillion only, and so there was a deficit of Rp25 trillion.

Keywords: *unit cost, free basic education*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, bahkan warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat

mengikuti program wajib belajar serta orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

wajib membiayainya serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 46 Ayat 1). Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis? Wikipedia menyebutkan pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran siswa untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah (Wikipedia, 2008).

The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa salah satu tujuan *Education for All (EFA)* adalah sekolah mesti bebas dari pungutan. (UNESCO, 2008). Ini berarti bahwa orang tua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya belajar di sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga, dan lain-lain.

Bank Dunia dalam laporan pembangunan dunia Tahun 2006 menyatakan bahwa pengurangan iuran di se-

kolah dasar telah terbukti meningkatkan pendaftaran (*enrollment*). Selain itu, laporan Bank Dunia tersebut juga menggambarkan bahwa pengurangan biaya seperti iuran sekolah atau biaya input lainnya seperti buku dan seragam sekolah dapat meningkatkan partisipasi pendidikan (World Bank, 2006:137-138).

Meski gratis bagi peserta didik, penyelenggaraan pendidikan dasar membutuhkan dana dan pemerintahlah yang harus menyediakan dana tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dasar dilakukan melalui satuan-satuan pendidikan sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), dan yang sederajat. Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar di satuan pendidikan dasar dibutuhkan sumber daya pendidikan dasar. Penggunaan sumber daya pendidikan berakibat pada biaya. Biaya pendidikan dasar tersebut harus ditanggung oleh pemerintah.

Sumber daya pendidikan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan. (UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 23). Pendidik adalah sumber daya manusia di sekolah/madrasah yang bergumul langsung dengan peserta didik dalam proses belajar-mengajar, seperti guru dan konselor; sedangkan, tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia di sekolah/madrasah yang menunjang proses pendidikan peserta didik, seperti kepala sekolah/madrasah, pustakawan, laboran, teknisi, tata usaha, bendahara, juru ketik, penjaga/petugas kebersihan, dan lain-lain (UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 5 dan 6).

Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berakibat pada biaya. Lembaga pendidikan harus memberikan dana pengganti atas keahlian, pikiran, dan waktu yang mereka curahkan dalam proses pendidikan. Ada dua bentuk dana pengganti yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu: a) yang berfungsi untuk menjamin kesejahteraan seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain dan b) yang berfungsi untuk mengembangkan mutu, seperti pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan lain-lain. Kedua macam dana pengganti yang diberikan lembaga pendidikan tersebut menyangkut dua macam biaya, yaitu biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan dan biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan adalah biaya yang timbul sebagai akibat pemberian dana pengganti kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sama dengan frekuensi satu kali atau lebih dalam satu tahun. Dana pengganti berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain merupakan biaya operasional pendidikan dan tenaga kependidikan. Biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah biaya yang timbul sebagai akibat pemberian dana pengganti kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sama dengan frekuensi hanya satu kali untuk selamanya atau berulang tetapi untuk lebih dari satu tahun. Dana pengganti berupa penyediaan dana untuk pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, dan lain-lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan). Prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Pasal 42 PP Standar Nasional Pendidikan). Prasarana pendidikan ini masa pakainya lebih dari satu tahun. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan). Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang masa pakainya lebih dari satu tahun seperti perabot, peralatan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, dan lain-lain dan sarana pendidikan yang masa pakainya kurang dari satu tahun seperti bahan dan alat pendidikan habis pakai.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaan dan perbaikan ringannya berakibat pada biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang muncul sebagai akibat dari pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang masa pakainya lebih dari satu tahun disebut biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan; sedangkan, biaya pemeliharaan dan perbaikan

ringannya disebut biaya operasional pemeliharaan dan perbaikan ringan karena biaya ini dikeluarkan satu tahun satu kali atau beberapa kali. Selain itu, biaya pendidikan yang muncul sebagai akibat dari pengadaan sarana pendidikan yang masa pakainya kurang atau sama dengan satu tahun disebut biaya operasional bahan dan alat habis pakai. Apabila biaya operasional bahan dan alat habis pakai digabung dengan biaya operasional pemeliharaan dan perbaikan ringan disebut biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan.

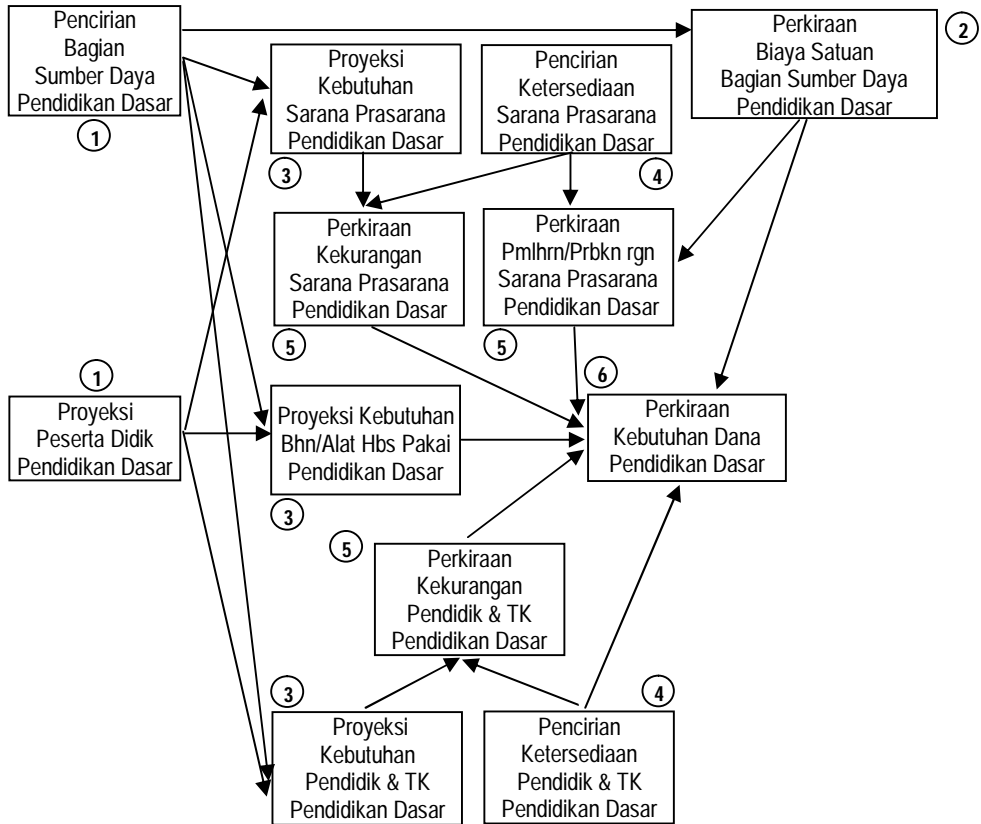
Dengan demikian, biaya pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan; 2) biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan; 3) biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan; dan 4) biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan. Apabila masing-masing biaya pendidikan tersebut dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah/madrasah tersebut per tahun maka biaya-biaya itu disebut: a) biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan; b) biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan; c) biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan; dan d) biaya satuan investasi sarana dan prasarana pendidikan. Gabungan dari keempat biaya satuan ini disebut biaya satuan pendidikan yang berarti biaya pendidikan per peserta didik per tahun.

Perumusan masalah dalam studi ini adalah berapa biaya satuan pen-

didikan dasar menurut masing-masing bagian biaya pendidikan dasar serta berapa biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan, biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan, dan biaya investasi sarana dan prasarana untuk pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009. Dengan dihitungnya semua biaya tersebut dapat diperkirakan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis di Indonesia pada tahun 2009.

METODE

Studi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang saling berkaitan, yang dapat dikelompokkan dalam enam tahap seperti terlihat dalam Gambar 1. Pada tahap pertama dicirikan bagian sumber daya pendidikan dasar. Pencirian bagian sumber daya pendidikan dasar dikerjakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2006 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tujuan pencirian bagian sumber daya pendidikan dasar adalah untuk mengetahui sumber daya pendidikan dasar standar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu.



Gambar 1 Bagan Studi Pendidikan Dasar Gratis

Pada tahap pertama ini juga dilakukan proyeksi peserta didik pendidikan dasar tahun 2009 dengan menggunakan metode *cohort*. Data yang diperlukan meliputi proyeksi penduduk usia pendidikan dasar (7 s.d. 15 tahun) yang usia tunggal dan tahun tunggal (*single age and single year*) yang dihasilkan dengan memecah hasil proyeksi lima (5) tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan hasil sensus penduduk (SP) tahun 2000 serta pendaftaran peserta didik di masing-masing tingkat di SD/MI dan SMP/MTs tahun 2008, angka penyerapan SD/MI dan SMP/MTs, angka naik (lulus), angka

mengulang, dan angka putus sekolah/madrasah di masing-masing tingkat di SD/MI dan SMP/MTs tahun 2009 yang diperoleh dari Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional.

Dengan sudah dicirikannya bagian sumber daya pendidikan dasar dapat diperkirakan biaya satuan bagian sumber daya pendidikan dasar. Perkiraan biaya satuan bagian sumber daya pendidikan dasar dilakukan pada tahap kedua dengan menggunakan berbagai sumber data tentang harga sumber daya pendidikan dasar seperti peraturan perundang-undangan, sekolah/madrasah, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Keuangan, dan penyedia bahan dan peralatan pendidikan pada tahun 2009.

Hasil proyeksi peserta didik pendidikan dasar bersama hasil pencirian bagian sumber daya pendidikan dasar digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan sumber daya pendidikan dasar yang meliputi sarana prasarana, bahan dan alat habis pakai, serta pendidik dan tenaga kependidikan. Proyeksi kebutuhan berbagai sumber daya pendidikan dasar yang dilakukan pada tahap ketiga ini menggunakan rumus-rumus hubungan antara peserta didik dengan sumber daya pendidikan yang terdapat dalam standar-standar pendidikan nasional, terutama standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar.

Pada tahap keempat dicirikan (diteliti) sumber daya pendidikan dasar yang tersedia pada tahun 2009, terutama sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan. Pencirian sumber daya pendidikan dasar yang tersedia dilakukan dengan menganalisis statistik pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar yang terdapat di Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009.

Dengan membandingkan proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan dasar dan hasil pencirian ketersediaan sumber daya pendidikan dasar dapat

diperkirakan kekurangan sumber daya pendidikan dasar pada tahun 2009 yang dilakukan pada tahap kelima. Perkiraan sumber daya pendidikan dasar yang kurang dan harus disediakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sarana dan prasarana, bahan dan alat habis pakai, serta pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahap kelima ini juga dilakukan perkiraan pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan mengacu pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Hasil perkiraan kebutuhan dan kekurangan sumber daya pendidikan dasar dan hasil perkiraan biaya satuan bagian sumber daya pendidikan dasar dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan dana pendidikan dasar pada tahun 2009 yang dilakukan pada tahap keenam.

HASIL

Dalam bagian ini akan disampaikan hasil dan pembahasan tentang proyeksi peserta didik pendidikan dasar, biaya satuan pendidikan dasar, dan kebutuhan dana pendidikan dasar gratis.

Proyeksi Peserta Didik Pendidikan Dasar

Hasil proyeksi peserta didik SD/MI dan SMP/MTs untuk tahun ajaran 2009/210 seperti dapat dilihat dalam Tabel 1 adalah masing-masing 28.718.963 anak dan 11.183.834 anak.

Tabel 1. Proyeksi Peserta didik SD, MI, SMP, dan MTs Tahun Ajaran 2009/2010

Jumlah Peserta didik (Anak)			Jumlah Peserta didik (Anak)		
SD	MI	SD + MI	SMP	MTs	SMP + MTs
25.321.244	3.397.719	28.718.963	8.915.703	2.268.131	11.183.834

Biaya Satuan Pendidikan Dasar

Seperti diuraikan pada Bagian 1, biaya satuan pendidikan dasar dapat dikelompokkan dalam: 1) biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan; 2) biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan; 3) biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4) biaya satuan investasi sarana dan prasarana pendidikan. Hasil perhitungan biaya satuan pendidikan dasar ini disajikan dalam Tabel 2.

Biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3,691 juta untuk jenjang SD/MI dan Rp5,685 juta untuk jenjang SMP/MTs. Biaya satuan pendidikan ini pada jenjang SD/MI terdiri dari biaya satuan operasional pendidik

dan tenaga kependidikan sebesar Rp2,120 juta, biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar Rp643 ribu, biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp23 ribu, dan biaya satuan investasi sarana dan prasarana sebesar Rp928 ribu. Sedangkan, pada jenjang SMP/MTs biaya satuan pendidikan ini terdiri dari biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp2,947 juta, biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar Rp792 ribu, biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp39 ribu, dan biaya satuan investasi sarana dan prasarana sebesar Rp1,906 juta.

Tabel 2. Perkiraan Biaya Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2009

Komponen	Biaya Satuan (Rp Ribu)	
	SD/MI	SMP/MTs
1. Biaya Satuan Operasional (BSO)		
1.1 BSO Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.120	2.947
1.2 BSO Bahan dan Alat Habis serta Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan	643	792
Sub Total Biaya Satuan Operasional	2.763	3.740
2. Biaya Satuan Investasi (BSI)		
2.1 BSI Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23	39
2.2 BIS Sarana dan Prasarana	928	1.906
Sub Total Biaya Satuan Investasi	904	1.945
Total Biaya Satuan Pendidikan	3.691	5.685

Keterangan:

Sesuai dengan Standar Sarana dan Sarana Pendidikan, SD/MI yang dimaksud memiliki 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar terdapat 28 peserta didik, yang berarti SD/MI tersebut memiliki 168 Peserta didik; sedangkan, SMP/MTs yang dimaksud memiliki 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar terdapat 40 peserta didik, yang berarti SMP/MTs tersebut memiliki 240 Peserta didik.

Kebutuhan Dana Pendidikan Dasar Gratis

Bagian ini akan memperkirakan kebutuhan sumber daya pendidikan dasar dan biayanya untuk tahun 2009 yang sekaligus juga berarti memperkirakan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis di seluruh Indonesia tahun 2009. Dengan menggunakan hasil proyeksi jumlah peserta didik pendidikan dasar tahun 2009 yang dibahas dalam Sub Bagian 3.1, hasil proyeksi kebutuhan sumber daya pendidikan dasar tahun 2009; hasil pencirian sumber daya pendidikan dasar yang tersedia pada tahun 2008 dan proyeksinya untuk tahun 2009, dan hasil perkiraan biaya satuan pendidikan dasar untuk tahun 2009 yang dibahas dalam Sub Bagian 3.2 maka dapat dihitung kebutuhan sum-

ber daya pendidikan dasar baik dalam bentuk unit maupun biayanya dalam nilai rupiah untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis tahun 2009.

Dalam sub-sub bagian berikut ini berturut-turut akan disampaikan hasil perkiraan kebutuhan sumber daya pendidikan dalam bentuk unit dan dana untuk menutup biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan biaya investasi sarana dan prasarana, serta akhirnya biaya total pendidikan dasar yang mencakup SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia untuk tahun 2009. Dengan demikian, dapat diperkirakan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis di Indonesia tahun 2009.

Biaya Operasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perkiraan biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009 disajikan dalam Tabel 3. Biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan biaya untuk memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik, kepala sekolah/madrasah, pustakawan/tata usaha, dan tenaga keamanan/kebersihan.

Tabel 3. Perkiraan Biaya Operasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2009

Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Satuan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah	Nilai per Satuan per Tahun (Rp)	Nilai Total per Tahun (Rp Juta)	Jumlah	Nilai per Satuan per Tahun (Rp)	Nilai Total per Tahun (Rp Juta)
1. Pendidik PNS dan Swasta							
1.1 Gaji pokok pendidik	Org	1.454.806	17.054.069	24.810.361	693.515	18.174.248	12.604.114
1.2 Tunjangan yg melekat	Org	1.454.806	2.719.595	3.956.484	693.515	2.719.595	1.886.080
1.3 Tunjangan fungsional	Org	1.284.570	3.337.017	4.286.632	693.515	3.337.017	2.314.271
1.4 Tunjangan profesi	Org	290.961	17.054.069	4.962.072	208.055	18.174.248	3.781.234
1.5 Tunj khusus di daerah terpencil	Org	13.800	18.547.380	255.954	6.200	18.547.380	114.994
1.6 Kelebihan jam mengajar	JPL	14.174.659	2.290	32.457	7.016.196	2.290	16.066
1.7 Penghargaan akhir masa bakti	Org	31.050	1.717.350	53.324	13.950	1.717.350	23.957
2. Tunj kepala sekolah/madrasah	Org	170.236	6.277.120	1.068.592	41.207	6.879.841	283.498
3. Gaji dan tunj tenaga instalasi	Org				41.207	19.375.280	798.397
4. Gaji dan tunj tenaga laboratorium	Org				41.207	19.375.280	798.397
5. Gaji dan tunj tenaga perpustakaan	Org				41.207	19.375.280	798.397
6. Gaji dan tunj tenaga tata usaha	Org	170.236	17.661.200	3.006.572	41.207	19.375.280	798.397
7. Gaji dan tunj bendaharawan	Org				41.207	19.375.280	798.397
8. Gaji dan tunj juru ketik	Org				41.207	17.051.129	702.626
9. Gaji dan tunj penjaga sekolah	Org	170.236	16.466.048	2.803.114	41.207	17.051.129	702.626
TOTAL				45.235.562			26.421.451

Keterangan:

- Jumlah pendidik SD/MI PNS dan swasta dan pendidik SMP/MTs PNS dan swasta masing-masing sebanyak 1,455 juta orang dan 694 ribu orang pada tahun 2009 diperoleh dari dokumen "Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009" yang disusun oleh Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional.
- Gaji pokok pendidik SD/MI PNS dan swasta dengan rata-rata Golongan IIIB dan pengalaman mengajar enam

tahun sebesar Rp17.054.069 dan gaji pokok pendidik SMP/MTs PNS dan swasta dengan rata-rata Golongan IIIC dan pengalaman mengajar delapan tahun sebesar Rp18.174.248 per tahun pada tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2006 tentang Daftar Gaji Pokok PNS dengan memperhitungkan inflasi tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar masing-masing 7 persen.

- Tunjangan yang melekat bagi pendidik SD/MI PNS dan swasta dengan

rata-rata Golongan IIIB dan pengalaman mengajar enam tahun dan tunjangan yang melekat pendidik SMP/MTs PNS dan swasta dengan rata-rata Golongan IIIC dan pengalaman mengajar delapan tahun sebesar Rp2.719.595 per tahun pada tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS dengan memperhitungkan inflasi tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar masing-masing 7 persen.

- Tunjangan fungsional untuk pendidik SD/MI dan SMP/MTs PNS dan swasta sebesar Rp3.337.017 per tahun pada tahun 2009 dihitung berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan yang disesuaikan dengan inflasi tahun-tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing 7 persen.
 - Jumlah pendidik SD/MI PNS dan swasta pada tahun 2009 yang mendapat tunjangan profesi sebanyak 290.961 orang merupakan 20 persen dari total pendidik SD/MI PNS dan swasta pada tahun 2009. Jumlah pendidik SMP/MTs PNS dan swasta pada tahun 2009 yang mendapat tunjangan profesi sebanyak 208.055 orang merupakan 30 persen dari total pendidik SMP/MTs PNS dan swasta pada tahun 2009. Besarnya tunjangan profesi adalah satu kali gaji pokok yang didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat 2.
 - Jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009 yang mendapat tunjangan khusus daerah terpe-
- cil masing-masing sebanyak 13.800 orang dan 6.200 orang dengan besarnya tunjangan Rp18.547.380 per orang bersumber dari "Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009" yang disusun oleh Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional dan diolah untuk pendidik SD/MI.
 - Jumlah kelebihan jam mengajar pendidik SD/MI dan SMP/MTs PNS dan swasta pada tahun 2009 sebanyak masing-masing 14,174 juta jam dan 7,016 juta jam dengan honor Rp2.290 per jam bersumber dari "Pagu Indikatif 2009" yang disusun oleh Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan 7 persen inflasi tahun 2007 yang diolah untuk pendidik SD/MI PNS.
 - Jumlah pendidik SD/MI PNS dan swasta dan pendidik SMP/MTs PNS dan swasta yang menerima penghargaan masa bakti pada tahun 2009 sebanyak masing-masing 31.050 orang dan 13.950 orang dengan nilai Rp 1.717.350 bersumber dari "Pagu Indikatif 2009" yang disusun oleh Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Jumlah kepala sekolah/madrasah, tenaga tata usaha dan penjaga sekolah SD/MI PNS dan swasta dan jumlah kepala sekolah/madrasah, tenaga instalasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga tata usaha, bendaharawan, juru ketik, dan penjaga sekolah SMP/MTs pada tahun 2009 adalah hasil estimasi dengan menggunakan data tahun 2008, estimasi kebutuhan tenaga berdasarkan perkembangan jumlah sekolah/madrasah, estimasi yang pensiun dan ke-

luar serta yang direkrut pada tahun 2009.

- Tunjangan kepala SD/MI dan kepala SMP/MTs dengan rata-rata Golongan IV pada tahun 2009 sebesar masing-masing Rp6,277juta dan Rp6,880 juta dihitung berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan yang disesuaikan dengan inflasi tahun-tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing 7 persen.
- Gaji dan tunjangan tenaga instalasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga tata usaha, dan bendaharawan SMP/MTs dengan rata-rata Golongan IIIA dan masa kerja 8 tahun pada tahun 2009 sebesar Rp19,375 juta dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2006 tentang Daftar Gaji Pokok PNS dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS yang disesuaikan dengan inflasi tahun-tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing 7 persen.
- Gaji dan tunjangan tenaga tata usaha SD/MI dengan rata-rata Golongan IID dan masa kerja 7 tahun pada tahun 2009 Rp15,426 juta dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2006 tentang Daftar Gaji Pokok PNS dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS yang disesuaikan dengan inflasi tahun-tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing 7 persen.
- Gaji dan tunjangan penjaga sekolah SD/MI dengan rata-rata Golongan IIB dan masa kerja 7 tahun dan gaji dan tunjangan juru ketik dan pen-

jaga sekolah dengan rata-rata Golongan IIC dan masa kerja 7 tahun pada tahun 2009 sebesar masing-masing Rp16,466 juta dan Rp17,051juta dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2006 tentang Daftar Gaji Pokok PNS dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS yang disesuaikan dengan inflasi tahun-tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing 7 persen.

Untuk SD/MI pada tahun 2009 dengan jumlah peserta didik SD/MI sebanyak 28.702 juta anak diperkirakan terdapat pendidik sebanyak 1.455 juta orang, kepala sekolah PNS sebanyak 170 ribu orang, tenaga tata usaha sebanyak 170 ribu orang, dan tenaga keamanan/kebersihan PNS sebanyak 170 ribu orang. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI pada tahun 2009 berjumlah Rp 45,236 trilyun. Angka ini terdiri dari: Rp 38,357 trilyun untuk gaji pokok pendidik, tunjangan yang melekat pada gaji pendidik, tunjangan fungsional pendidik, tunjangan profesi pendidik, tunjangan khusus pendidik di daerah terpencil, kelebihan jam mengajar pendidik, dan penghargaan masa bakti pendidik PNS; Rp1,069 trilyun untuk tunjangan kepala sekolah, Rp3,007 trilyun untuk gaji dan tunjangan tenaga tata usaha/perpustakaan PNS, dan Rp2,803 trilyun untuk gaji dan tunjangan penjaga sekolah/madrasah.

Untuk SMP/MTs pada tahun 2009 dengan jumlah peserta didik SMP/MTs sebanyak 11 juta diperkirakan terdapat pendidik sebanyak 694 ribu orang serta kepala sekolah/madrasah, tenaga tek-

nisi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, tenaga tata usaha, bendaharawan, juru ketik, dan penjaga sekolah/madrasah masing-masing sebanyak 41.207 ribu orang. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs pada tahun 2009 berjumlah Rp26,421 triliun. Angka ini terdiri dari: Rp20,741 triliun untuk gaji pokok pendidik, tunjangan yang melekat pada gaji pendidik, tunjangan fungsional pendidik, tunjangan profesi pendidik, tunjangan khusus pendidik di daerah terpencil, kelebihan jam mengajar pendidik, dan penghargaan masa bakti pendidik; Rp283,498 milyar untuk tunjangan kepala sekolah/madrasah; Rp798,397 milyar untuk gaji dan tunjangan tenaga instalasi; Rp798,397 milyar untuk gaji dan tunjangan tenaga laboratorium; Rp798,397 milyar untuk gaji dan tunjangan tenaga perpustakaan; Rp798,397 milyar untuk gaji dan tunjangan tenaga tata usaha; Rp798,397 milyar untuk gaji dan tunjangan bendaharawan; Rp702,626 milyar untuk gaji dan tunjangan juru ketik; dan Rp702,626 milyar untuk gaji dan tunjangan penjaga sekolah/madrasah.

Biaya Operasional Bahan dan Alat Habis Pakai dan Pemeliharaan

Perkiraan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan

untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009 disajikan dalam Tabel 4. Biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan bahan dan alat pendidikan yang habis digunakan dalam satu tahun atau kurang serta kegiatan dan pemeliharaan yang dilakukan satu tahun satu kali atau kurang. Biaya ini meliputi biaya-biaya untuk mengadakan alat tulis sekolah, bahan habis pakai, alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan peserta didik, penilaian (penggandaan soal), rapat-rapat pendidik sekolah, dan perjalanan dinas.

Untuk SD/MI pada tahun 2009 dengan jumlah peserta didik sebanyak 28.702 juta anak dan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan sebesar Rp545 ribu per peserta didik per tahun, besarnya biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan untuk semua peserta didik adalah Rp15,649 triliun. Untuk SMP/MTs pada tahun 2009 dengan jumlah peserta didik sebanyak 11.060 juta dan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan sebesar Rp760 ribu per peserta didik per tahun, besarnya biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan untuk semua peserta didik adalah Rp8,401 triliun.

Tabel 4. Perkiraan Biaya Operasional Bahan dan Alat Habis Pakai serta Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2009

Peserta didik dan Bahan & Alat Habis Pakai serta Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan	SD/MI		SMP/MTs			
	Jumlah (Orang)	Biaya per Peserta didik (Rp)	Biaya Total (Rp Juta)	Jumlah (Orang)	Biaya per Peserta didik (Rp)	Biaya Total (Rp Juta)
Peserta didik	28.702.394			11.060.344		
1. Alat Tulis Sekolah		102.292	2.936.034		117.369	1.298.141
2. Bahan dan Alat Habis Pakai		50.974	1.463.077		90.547	1.001.477
3. Daya dan Jasa		57.752	1.657.626		77.714	859.547
5. Pemeliharaan sarana & prasarana		135.770	3.896.932		192.881	2.133.325
6. Pembinaan Peserta didik		121.192	3.478.509		164.937	1.824.264
7. Penilaian (Penggandaan Soal)		36.751	1.054.850		51.682	571.622
8. Rapat-rapat						
8. Kegiatan Komite Pendidikan Sekolah		9.114	261.603		15.951	176.427
8. Kegiatan Komite Sekolah		5.105	146.519		2.552	28.223
9. Transport/Perjalanan Dinas		26.251	753.479		45.939	508.102
Total		545.203	15.648.630		759.572	8.401.127

Biaya Investasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya ini meliputi biaya-biaya untuk penerimaan tenaga baru, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Perkiraan biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009 disajikan dalam Tabel 5.

Untuk SD/MI pada tahun 2009 perlu dikeluarkan dana sebesar Rp1,588

trilyun untuk penerimaan tenaga baru, pendidikan D4/S1, pendidikan profesi, pelatihan, dan sertifikasi pendidik; sebesar Rp26,312 milyar untuk penerimaan tenaga baru dan pelatihan kepala sekolah/madrasah; Rp23,703 milyar untuk penerimaan tenaga baru tenaga tata usaha; dan Rp5,282 milyar untuk penerimaan tenaga baru penjaga sekolah/madrasah, sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,643 trilyun. Untuk SMP/MTs pada tahun 2009 perlu dikeluarkan dana sebesar Rp853,263 milyar untuk penerimaan tenaga baru, pendidikan D4/S1, pendidikan profesi, pelatihan, dan sertifikasi pendidik; sebesar

Rp6,493 milyar untuk penerimaan tenaga baru dan pelatihan kepala sekolah/madrasah; sebesar Rp5,656 milyar untuk penerimaan tenaga baru tenaga instalasi; sebesar Rp5,791 milyar untuk penerimaan tenaga baru tenaga laboran; sebesar Rp4,518 milyar untuk penerimaan tenaga baru tenaga perpustakaan; sebesar Rp46.007 milyar untuk penerimaan tenaga baru dan pelatihan tenaga tata usaha; sebesar Rp7,328 milyar untuk penerimaan tenaga baru dan pelatihan bendaharawan; sebesar Rp448 juta untuk penerimaan tenaga baru juru ketik; dan sebesar Rp1,469 milyar untuk penerimaan tenaga baru penjaga sekolah/madrasah; sehingga semuanya berjumlah Rp930,970 milyar.

Biaya Investasi Sarana dan Prasarana

Biaya investasi sarana dan prasarana adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun/mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang masa pakainya lebih dari satu tahun. Biaya ini meliputi biaya-biaya untuk pembangunan/mengadakan lahan, bangunan, jaringan daya an jasa, perabot, peralatan, dan media pendidikan.

Perkiraan biaya investasi sarana dan prasarana untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009 disajikan dalam Tabel 6a dan Tabel 6b. Untuk SD/MI pada tahun 2009 keperluan dana itu mencapai Rp 24,932 trilyun dan untuk

SMP/MTs pada tahun 2009 keperluan dana itu mencapai Rp34,008 trilyun.

Biaya Total

Dengan menjumlah biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan biaya investasi sarana dan prasarana untuk pendidikan dasar, dapat diketahui biaya total pendidikan dasar. Pada Tabel 7 disajikan perkiraan biaya total pendidikan dasar pada tahun 2009 untuk SD/MI dan SMP/MTs yang sekaligus juga merupakan kebutuhan dana untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis tahun 2009. Pada tahun 2009, diperkirakan kebutuhan dana untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis mencapai Rp157,221 trilyun yang terdiri dari Rp87,460 trilyun untuk penyelenggaraan SD/MI dan Rp69,762 trilyun untuk penyelenggaraan SMP/MTs. Dana penyelenggaraan SD/MI sebesar Rp87,460 trilyun tersebut meliputi dana untuk menutupi biaya operasional sebesar Rp 60,884 trilyun dan dana untuk menutupi biaya investasi sebesar Rp26,576 trilyun. Dana penyelenggaraan SMP/MTs sebesar Rp 69,762 trilyun tersebut meliputi dana untuk menutupi biaya operasional sebesar Rp34,822 trilyun dan dana untuk menutupi biaya investasi sebesar Rp34,939 trilyun.

Tabel 5. Perkiraan Biaya Investasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2009

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Satuan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah	Biaya per Orang (Rp)	Biaya Total (Rp Juta)	Jumlah	Biaya per Orang (Rp)	Biaya Total (Rp Juta)
1. Pendidik							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org	58.192	286.225	16.656	107.261	286.225	30.701
b. Pendidikan D4/S1	Org	72.740	11.449.000	832.804	38.076	11.449.000	435.929
c. Pendidikan Profesi	Org	36.370	11.449.000	416.402	19.038	11.449.000	217.965
d. Pelatihan	Org	145.481	1.144.900	166.561	76.152	1.144.900	87.186
e. Sertifikasi	Org	72.740	2.140.000	155.664	38.076	2.140.000	81.482
Sub Total				1.588.087			853.263
2. Kepala Sekolah/Madrasah							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org	17.024	171.735	2.924	4.841	171.735	831
b. Pelatihan	Org	17.024	1.373.880	23.388	4.121	1.373.880	5.661
Sub Total				26.312			6.493
3. Tenaga Instalasi							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org				19.759	286.225	5.656
4. Tenaga Laboran							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org				20.232	286.225	5.791
5. Tenaga Pustaka							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org				15.784	286.225	4.518
6. Tenaga Tata Usaha							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org	82.812	286.225	23.703	12.390	286.225	3.546
b. Pelatihan	Org				41.207	1.030.410	42.460
Sub Total							46.007
7. Bendaharawan							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org				10.766	286.225	3.082
b. Pelatihan	Org				4.121	1.030.410	4.246
Sub Total							7.328
8. Juru Ketik							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org				1.954	228.980	448
9. Penjaga/Kebersihan							
a. Penerimaan Tenaga Baru	Org	23.068	228.980	5.282	6.415	228.980	1.469
Total				1.643.384			930.970

Keterangan:

- Jumlah pendidik baru SD/MI dan SMP/MTs yang diterima pada tahun 2009 sama dengan proyeksi jumlah pendidik yang pensiun dan keluar yang diperkirakan sebesar empat persen dari jumlah pendidik yang ada pada tahun 2008 ditambah kebutuhan tambahan pendidik karena bertambahnya jumlah sekolah/ma-drasah.
- Jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang diberi beasiswa pendidikan D4/S1 pada tahun 2009 masing-masing adalah lima persen dan dua setengah persen dari proyeksi jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2009.
- Jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang diberi beasiswa pendidikan profesi pada tahun 2009 adalah masing-masing dua setengah persen dan satu seperempat persen dari proyeksi jumlah pendidik masing-masing SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2009.
- Jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2009 adalah sepuluh persen dari proyeksi jumlah pendidik masing-masing SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2009.
- Jumlah pendidik yang memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional pada tahun 2008 dan 2009 merupakan lima persen dari proyeksi jumlah pendidik yang ada pada tahun-tahun 2008 dan 2009.
- Jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional pada tahun 2009 merupakan lima persen dari proyeksi jumlah pendidik SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2009.
- Jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs baru yang terima pada tahun 2009 sama dengan proyeksi jumlah kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang pensiun dan keluar yang di-perkirakan sebesar lima persen dari jumlah kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2008 ditambah dengan kebutuhan tambahan kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs baru karena adanya penambahan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2009.
- Jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2009 merupakan sepuluh persen dari proyeksi jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs yang ada pada tahun 2009.
- Jumlah tenaga tata usaha dan penjaga SD/MI baru yang diterima pada tahun 2009 sama dengan proyeksi jumlah tenaga tata usaha dan penjaga yang dibutuhkan pada tahun 2009 dikurangi dengan jumlah tenaga tata usaha dan penjaga yang tersedia pada tahun 2008 setelah dikurangi dengan yang pensiun dan keluar pada tahun 2009 yang diperkirakan masing-masing tiga persen dan dua setengah persen dari jumlah tenaga tata usaha dan penjaga yang ada pada tahun 2008.
- Jumlah tenaga instalasi, laboran, pustakawan, tata usaha, bendaharawan, juru ketik dan penjaga sekolah SMP/MTs baru yang diterima pada

tahun 2009 sama dengan proyeksi jumlah yang dibutuhkan pada tahun 2009 dikurangi dengan jumlah yang tersedia pada tahun 2008 setelah di-

kurangi yang pensiun dan keluar pada tahun 2009 yang diperkirakan besarnya sekitar tiga persen dari jumlah yang ada pada tahun 2008.

Tabel 6a. Perkiraan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana untuk SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2009

Sarana dan Prasarana Pendidikan	Satuan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp Juta)	Jumlah	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp Juta)
Unit Sekolah Baru (USB)	unit				800	2.884.975.944	2.307.981
Ruang Kelas Baru (RKB)	unit	100.000	103.480.642	10.348.064	13.120	118.263.590	1.551.618
Perabot Kelas	paket	262.423	15.979.369	4.193.361	51.212	24.152.810	1.236.915
Peralatan Kelas	paket	368.552	688.657	253.806	83.127	1.420.821	118.109
Ruang Perpustakaan	unit				10.379	194.026.203	2.013.828
Perabot Perpustakaan	paket	33.958	4.610.512	156.564	13.796	22.800.111	314.541
Peralatan Perpustakaan	paket	56.773	927.369	52.649	16.529	9.178.091	151.708
Media Belajar	paket	33.958	54.529.755	1.851.721	14.420	122.701.727	1.769.415
Ruang Lab IPA	unit				12.435	221.744.232	2.757.281
Perabot Laboratorium IPA	paket				14.258	56.753.380	809.181
Peralatan Laboratorium IPA	paket	56.773	5.686.489	322.839	16.745	41.344.171	692.290
Ruang Lab Komputer	unit				16.390	177.395.386	2.907.509
Perabot Lab Komputer	paket				18.725	27.095.203	507.360
Peralatan Lab Komputer	paket				16.578	128.830.445	2.135.791
Ruang Lab Bahasa	unit				18.642	221.744.232	4.133.671
Perabot Lab Bahasa	paket				17.924	55.617.296	996.901
Peralatan Lab Bahasa	paket				17.998	41.309.824	743.505
Ruang Serba Guna	unit	8.291	103.480.642	857.978	16.669	221.744.232	3.696.340
Perabot di R. Serba Guna	paket				17.450	57.706.166	1.006.974
Peralatan di R. Serba Guna	paket	56.773	6.985.607	396.593	17.800	6.434.567	114.537
Perabot Kesenian & Ketrp.	paket				15.721	44.820.545	704.602
Peralatan Kesenian	paket	85.292	2.361.356	201.404	16.283	17.516.169	285.209
Peralatan Keterampilan	paket				19.960	6.601.493	131.766
Ruang Kantor	unit	8.291	103.480.642	857.978	2.580	171.851.780	443.413
Perabot Kantor	paket	33.958	43.724.189	1.484.785	7.994	48.002.795	383.736
Peralatan Kantor	paket	42.514	36.581.845	1.555.225	9.799	29.002.034	284.181
Ruang Bimb & Konseling	unit				2.580	16.630.817	42.911
Perabot Konseling	paket				7.994	8.452.797	67.572
Peralatan Konseling	paket				12.806	1.049.873	13.445
Ruang UKS	unit				14.606	22.174.423	323.874
Perabot UKS	paket	28.254	5.605.774	158.387	15.510	11.055.154	171.470
Peralatan UKS	paket	85.292	1.471.998	125.549	9.799	1.629.193	15.964
Ruang PMR/Pramuka	unit				2.580	44.348.846	114.429
Perabot PMR/Pramuka	paket				7.994	2.611.288	20.875

Tabel 6b. Perkiraan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana untuk SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2009 (Lanjutan)

Sarana dan Prasarana Pendidikan	Satuan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp Juta)	Jumlah	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp Juta)
Peralatan PMR/Pramuka	paket	85.292	1.230.768	104.974	12.806	1.723.075	22.066
Ruang Ibadah	unit				2.580	22.174.423	57.215
Perabot Ibadah	paket	33.958	2.023.038	68.698	7.994	5.216.164	41.698
Peralatan Ibadah	paket	85.292	198.068	16.894	12.806	723.348	9.263
Ruang Partry	unit	8.291	16.630.817	137.889	2.580	16.630.817	42.911
Perabot & Peralatan Pantry	paket	56.773	865.773	49.152	9.799	4.139.042	40.557
Ruang WC & KM	unit	8.291	27.718.029	229.815	2.580	66.523.270	171.644
Perabot & Per. WC & KM	paket	56.773	3.668.260	208.258	18.822	6.766.359	127.354
Gudang	unit	8.291	33.261.635	275.779	2.580	38.805.241	100.125
Peralatan Olah Raga	paket	42.514	12.689.041	539.457	18.822	11.876.735	223.540
Rumah Penjaga Sekolah	unit	8.291	38.805.241	321.742	2.580	38.805.241	100.125
Perabot Rumah Penjaga Sekolah	paket	24.180	1.831.840	44.294	6.791	10.739.162	72.929
Peralatan Penjaga Sekolah	paket	85.292	40.072	3.418	18.822	68.694	1.293
Jaringan Daya dan Jasa	unit	15.291	7.510.544	114.845	3.783	7.510.544	28.414
Total				24.932.118			34.008.036

Keterangan:

- Pencirian jenis dan spesifikasi bagian sarana dan prasarana dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Jumlah sarana dan prasarana yang harus diadakan pada tahun 2009 diperkirakan dengan memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan proyeksi perkembangan jumlah peserta didik pada tahun 2009 dikurangi dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada tahun 2008 setelah memperhitungkan penyusutan pada tahun 2008.
- Harga satuan ditentukan berdasarkan harga pasar di Jakarta ditambah 20 persen yang mencakup pajak sebesar 10 persen dan biaya administrasi sebesar 10 persen. Harga satu-

an di Jakarta ini kemudian dikonversi menjadi harga pasar nasional dengan menggunakan indeks harga konstruksi yang dikembangkan Badan Pusat Statistik Tahun 2009.

Realisasi Anggaran Pendidikan Dasar

Dari realisasi anggaran pendidikan keseluruhan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp207,41 trilyun, diperkirakan yang dialokasikan ke pendidikan dasar adalah sebesar Rp132,24 trilyun. Realisasi alokasi dana ke pendidikan dasar tersebut terdiri dari anggaran untuk SD/MI sebesar Rp82,96 trilyun dan anggaran untuk SMP/MTs sebesar Rp 49,28 trilyun.

Perbandingan antara realisasi anggaran pendidikan dasar tersebut dengan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis

seperti yang diperkirakan di sub bagian 3.3 menunjukkan terjadinya kekurangan dana sebesar sekitar Rp25 trilyun, yang terdiri dari kekurangan dana untuk SD/MI sebesar sekitar Rp4,5 trilyun dan kekurangan dana yang lebih besar lagi terjadi di SMP/MTs sebesar sekitar Rp20,5 trilyun. Akibatnya, meskipun pendidikan dasar gratis sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Menteri Pendidikan

Nasional dan pejabat publik lain sejak awal tahun 2009, namun dalam Kenyataannya, masih banyak terjadi pungutan bagi peserta didik, terlebih bagi peserta didik SMP/MTs untuk menutup kekurangan pendanaan pendidikan dasar tersebut. Akibat lain adalah mutu sumber daya pendidikan baik pendidik dan tenaga kependidikan maupun sarana dan prasarana masih banyak yang di bawah standar.

Tabel 7. Perkiraan Biaya Total Pendidikan Dasar pada Tahun 2009

Jenis Biaya	Nilai (Rp Juta)		
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI dan SMP/MTs
A. Biaya Operasional (BO)			
1. BO Pendidik & Tenaga Kependidikan	45.235.562	26.421.451	71.657.013
2. BO Bahan & Alat Habis Pakai & Pemeliharaan	15.648.630	8.401.127	24.049.757
Sub Total BO	60.884.192	34.822.578	95.706.770
B. Biaya Investasi (BI)			
1. BI Pendidik & Tenaga Kependidikan	1.643.384	930.970	2.574.354
2. BI Sarana dan Prasarana	24.932.118	34.008.036	58.940.154
Sub Total BI	26.575.501	34.939.007	61.514.508
Total	87.459.693	69.761.585	157.221.278

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disampaikan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan saran.

- Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dibutuhkan sumber daya pendidikan dasar. Sumber daya pendidikan dasar meliputi pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana dan

prasarana pendidikan dasar. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar berakibat pada biaya pendidikan dasar. Biaya pendidikan dasar dapat dikelompokkan ke dalam: a) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan; b) biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan; c) biaya operasional bahan dan alat habis pakai serta

- pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana; dan d) biaya investasi sarana dan prasarana.
- Bila keempat jenis biaya pendidikan tersebut digabung disebut biaya pendidikan. Bila biaya pendidikan ini dihitung per tahun dan dibagi dengan jumlah peserta didik disebut biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun. Biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3,691 juta untuk jenjang SD/MI dan Rp 5,685 juta untuk jenjang SMP/MTs. Biaya satuan pendidikan SD/MI ini terdiri dari biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp2,120 juta, biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar Rp643 ribu, biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp23 ribu, dan biaya satuan investasi sarana dan prasarana sebesar Rp928 ribu. Sedangkan, pada jenjang SMP/MTs biaya satuan pendidikan ini terdiri dari biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp2,947 juta, biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar Rp792 ribu, biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp39 ribu, dan biaya satuan investasi sarana dan prasarana sebesar Rp1,906 juta.
 - Dengan menggunakan hasil proyeksi peserta didik SD/MI dan SMP/MTs tahun 2009 dan hasil perkiraan biaya satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2009 serta perkiraan kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan sumber daya SD/MTs dan SMP/MTs dapat dihitung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan dasar gratis sebesar Rp157,22 triliun pada tahun 2009. Dari keseluruhan kebutuhan dana Rp157,22 triliun pada tahun 2009 tersebut, disediakan untuk penyelenggaraan SD/MI sebesar Rp87,46 triliun dan untuk penyelenggaraan SMP/MTs sebesar Rp69,762 triliun.
 - Namun, pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar secara keseluruhan sebesar Rp132,24 triliun, yang terdiri dari anggaran untuk SD/MI sebesar Rp82,96 triliun dan anggaran untuk SMP/MTs sebesar Rp49,28 triliun. Hal ini berarti terjadi kekurangan dana penyelenggaraan pendidikan dasar gratis sebesar sekitar Rp25 triliun, yang terdiri dari kekurangan dana untuk SD/MI sebesar sekitar Rp4,5 triliun dan untuk SMP/MTs sebesar sekitar Rp20,5 triliun.
 - Akibatnya, meskipun pendidikan dasar gratis sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pejabat publik lain sejak awal tahun 2009, namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pungutan bagi peserta didik, terlebih bagi peserta didik SMP/MTs untuk menutup kekurangan pendanaan pendidikan dasar tersebut. Akibat lain adalah mutu sumber daya pendidikan baik pendidik dan tenaga kependidikan maupun sarana

dan prasarana masih banyak yang di bawah standar.

Saran

- Di tahun-tahun mendatang agar amanah undang-undang tentang pendidikan dasar gratis dapat dilaksanakan secara konsisten dan bukan hanya slogan, perlu dihitung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan dasar gratis dan disediakan dana yang sesuai dengan kebutuhan dana tersebut.
- Perlu dilakukan pembagian kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendanaan pendidikan gratis beserta skema pendanaannya yang sesuai dengan sistem pemerintahan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga dapat menjamin keberlanjutan, kememadain, dan keadilan pendanaan. Alternatif pembagian kewenangan dan kewajiban dan skema pendanaan pendidikan dasar gratis tersebut adalah sebagai berikut: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan didanai oleh pemerintah pusat melalui skema belanja Pemerintah Pusat terutama di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama; 2) biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan didanai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan didanai oleh Pemerintah Provinsi melalui skema Dana Alokasi Khusus

(DAK); dan 4) biaya Investasi sarana dan prasarana didanai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia kantor Jakarta yang mensponsori studi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang telah memberikan banyak masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2000. *Sensus Penduduk 2000*. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2009. *Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2009*.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2009. *Pagu Indikatif 2009*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Proses. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2006 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Daftar Gaji Pokok PNS.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS.
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2008. *Statistik Pendidikan 2008*.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen.
- World Bank. 2006. *World Bank Report 2006: Equity and Development*. Washington, D.C.: the World Bank.